

# ANALISIS KETIMPANGAN FISIK WILAYAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Firsta Rekayasa Hernovianty<sup>1</sup>, Nana Novita Pratiwi<sup>2</sup>**

1. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tanjungpura, Pontianak
2. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tanjungpura, Pontianak

## Abstrak

*Peningkatan fasilitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara merata. Pertumbuhan yang tidak seimbang dapat memicu ketimpangan pembangunan antar daerah. Kabupaten Sekadau terletak di antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang yang secara relatif 'lebih berkembang'. Kondisi ini menguntungkan bagi pengembangan wilayah karena pergerakan ekonomi kedua kabupaten tersebut akan melalui wilayah Kabupaten Sekadau. Namun, cakupan wilayah Kabupaten Sekadau yang luas memanjang dengan variasi kemiringan menjadi tantangan fisik dalam upaya pemerataan dan jangkauan pembangunan wilayah. Kondisi infrastruktur yang belum lengkap juga menyebabkan rendahnya aksesibilitas dan lambatnya pertumbuhan antar kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Sekadau berdasarkan aspek fisik. Pendekatan penelitian termasuk jenis kuantitatif dengan metode analisis skoring berdasarkan perbandingan antara jumlah ketersediaan dan jumlah kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan fisik wilayah Kabupaten Sekadau tergolong ketimpangan sedang dimana 57% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan sedang, 29% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan tinggi dan 14% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik tinggi adalah Kecamatan Nanga Taman dan Belitang Hulu. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik rendah adalah Kecamatan Sekadau Hilir.*

**Kata kunci:** *ketersediaan sarana; ketimpangan fisik; ketimpangan wilayah*

## Abstract

*[Regional Physical Disparity Analysis of Sekadau Regency, West Kalimantan Province] Facilities improvement can encourage economic growth and regional development equally. Unbalanced growth can trigger development disparity between regions. Sekadau Regency is located between Sanggau Regency and Sintang Regency which is relatively 'more developed'. This condition is favorable for regional development because the economic movement of these two regencies will through Sekadau. However, the wide area of Sekadau Regency is elongated with slope variations, which is physical challenge to equalize and reach regional development. The incomplete infrastructure also lead decrease accessibility and slow growth among districts. This study aims to analyze regional disparity of Sekadau Regency based on physical aspects. This research use a quantitative approach with technique of scoring analysis to compare between the amount of availability and the number of needs for educational facilities, health facilities and economic facilities. The results showed that the regional physical disparity of Sekadau Regency was classified as medium disparity, where 57% of the districts were at the medium rate of disparity, 29% of the districts were the high rate of disparity as well as 14% of the districts were at the low rate of disparity. The districts classified as medium physical disparity are Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Belitang Hilir and Belitang Districts. The classified as high physical disparity are Nanga Taman and Belitang Hulu Districts. The classified as low in physical disparity is Sekadau Hilir District.*

**Keywords:** *facilities availability; physical disparity; regional disparity*

## 1. Pendahuluan

Pengembangan wilayah bertujuan agar dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan sektor maupun wilayah, sehingga mampu mengalokasikan pemanfaatan ruang dan sumber daya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan target pembangunan. Optimal disini memiliki makna bahwa tingkat kemakmuran bisa dicapai seiring dengan unsur sosial budaya dan sesuai kapasitas lingkungan yang berkelanjutan (Ambardi dan Prihawantoro, 2002).

distribusi penghasilan masyarakat dan pembangunan antar daerah menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan wilayah suatu negara (Sirojuzilam, 2005). Wilayah-wilayah pinggir atau terbelakang cenderung bergantung kepada daerah luar yang relatif lebih kuat (Adisasmita, 2014). Produktivitas wilayah dan kondisi sosial kependudukan yang berbeda antar daerah juga dapat memicu ketimpangan (Simbolon, 2017). Kesenjangan wilayah dapat juga dilihat dari berbagai unsur seperti letak geografis, sosial budaya, administrasi kebijakan, kelembagaan, lingkungan, sarana dan prasana umum, dan sebagainya (Gajdos, 2006 dalam Aprianor, 2015). Peningkatan penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang kemajuan ekonomi dan menekan tingkat kesenjangan antar daerah (Rosmeli, 2018). Oleh karena itu, ketimpangan wilayah dapat ditinjau dari segi fisik, khususnya pada kelengkapan sarana dan prasarana umum.

Kabupaten Sekadau terdiri dari 7 kecamatan yang memiliki berbagai masalah terkait ketimpangan pembangunan antar wilayah. Cakupan wilayah geografis Kabupaten Sekadau yang ‘memanjang’ merupakan masalah geografis yang serius bila dikaitkan dengan usaha pemerataan dan jangkauan pembangunan wilayah. Bentuk geografis ideal suatu wilayah adalah memusat. Pola ini memiliki keutamaan yaitu mencerminkan keseimbangan pembangunan perkotaan ke segala arah (Zahnd, 2008). Aliran Sungai Sekadau dan Sungai Kapuas yang membelah wilayah utara dan selatan kabupaten menyebabkan antar kecamatan sulit diakses. Kondisi jalan belum memadai dan tidak merata menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau. Selain itu, sekitar 21 % atau seluas 114.325 Ha, didominasi oleh lahan dengan tingkat elevasi di atas 15 % (sekitar 6% diantaranya memiliki elevasi di atas 40%). Hal ini dapat menjadi tantangan utama dalam perencanaan wilayah di Kabupaten Sekadau terutama dalam penyediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Minimnya

anggaran dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kabupaten Sekadau juga merupakan permasalahan ketimpangan pembangunan wilayah Kabupaten Sekadau.

Jarak tempuh terjauh antar kecamatan menuju ibukota Kabupaten Sekadau yang berada di Kecamatan Sekadau Hilir dimiliki oleh Kecamatan Belitang Hulu (Balai Sepuak) dan Kecamatan Belitang dengan jarak tempuh masing-masing 112,20 km dan 81,60 km (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau, 2020). Kondisi ini dapat menyebabkan keteringgalan pembangunan dan rendahnya daya saing 2 kecamatan tersebut dengan 5 kecamatan lain.

Berdasarkan kondisi di atas, perlu adanya penelitian terkait analisis ketimpangan fisik wilayah di Kabupaten Sekadau sehingga proses pembangunan yang terjadi dapat dimaksimalkan dan menekan tingkat kemiskinan ke arah pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

## 2. Bahan dan Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis skoring. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian dimana peneliti lebih banyak menghimpun data berupa angka-angka bukan kata-kata maupun gambar. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki azas filsafat positivisme dengan meneliti beberapa sampel secara acak memakai perangkat tertentu, proses analisis berupa kajian statistik untuk menguji hipotesa dimana sebelumnya telah diasumsikan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara kepada informan yang terdiri dari BAPPEDA Kabupaten Sekadau, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau. Teknik analisis menggunakan metode skoring dengan mempertimbangkan asumsi tolak ukur setiap variabel penilaian. Berikut panduan pemberian skor setiap variabel penilaian ketimpangan fisik:

**Tabel 1.** Panduan Pemberian Skor Setiap Variabel Penilaian Ketimpangan Fisik Kabupaten Sekadau (Kajian Literatur, 2020)

Variabel	Tolak Ukur	Parameter (Skor)
Ketersediaan Sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah Fasilitas <	Ketimpangan Tinggi (3)
	Jumlah Fasilitas =	Ketimpangan Sedang (2)
	Jumlah Fasilitas >	Ketimpangan Rendah (1)
	Jumlah Fasilitas <	Ketimpangan

<sup>1)</sup> Penulis Korespondensi.

E-mail: teta.firsa02@gmail.com

Variabel	Tolak Ukur	Parameter (Skor)
Sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Tinggi (3)
	Jumlah Fasilitas =	Ketimpangan
	Jumlah Kebutuhan	Sedang (2)
	Jumlah Fasilitas > Jumlah Kebutuhan	Ketimpangan Rendah (1)
Ketersediaan Sarana dan prasarana perekonomian	Jumlah Fasilitas < Jumlah Kebutuhan	Ketimpangan Tinggi (3)
	Jumlah Fasilitas =	Ketimpangan
	Jumlah Kebutuhan	Sedang (2)
	Jumlah Fasilitas > Jumlah Kebutuhan	Ketimpangan Rendah (1)

### 3. Hasil dan Pembahasan

Analisis ketimpangan fisik wilayah pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

### 3.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tinggi rendahnya capaian indikator pembangunan pendidikan dapat ditunjukkan oleh besaran jumlah penyediaan fasilitas pendidikan (Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan) dan pemerataan persebarannya ke seluruh kecamatan. Ketimpangan fisik wilayah berdasarkan ketersediaan sarana pendidikan dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang terdapat di tiap kecamatan. Berdasarkan kriteria penyediaan sarana pendidikan SNI-03-1733-2004 dapat dihitung jumlah kebutuhan sarana pendidikan di tiap kecamatan dengan membagi jumlah penduduk tiap kecamatan dengan jumlah penduduk pendukung ketersediaan sarana pendidikan. Kriteria penyediaan jumlah penduduk pendukung sarana pendidikan jenis TK sebesar 1.250 jiwa, SD/MI 1.600 jiwa, SMP/MTs 4.800 jiwa dan SMA/SMK/MA 4.800 jiwa.

**Tabel 2.** Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	TK/RA			SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK		
		Kt (a)	Kb (b)	a / b	Kt (c)	Kb (d)	c / d	Kt (e)	Kb (f)	e / f	Kt (g)	Kb (h)	g / h
Nanga Mahap	27.512	3	22	a < b	31	17	c > d	9	6	e > f	2	6	g < h
Nanga Taman	28.602	9	23	a < b	36	17	c > d	10	6	e > f	3	6	g < h
Sekadau Hulu	30.518	12	24	a < b	40	17	c > d	15	6	e > f	4	6	g < h
Sekadau Hilir	67.892	55	50	a > b	60	39	c > d	18	13	e > f	13	13	g = h
Belintang Hilir	24.175	4	18	a < b	29	14	c > d	6	5	e > f	2	5	g < h
Belintang	14.119	15	10	a > b	11	8	c > d	4	3	e > f	2	3	g < h
Belintang Hulu	21.479	1	16	a < b	34	13	c > d	7	4	e > f	3	4	g < h

Keterangan:

*Kb: Kebutuhan*

*Kt: Ketersediaan*

Didapat hasil bahwa jumlah sarana TK/RA dan SMA/SMK/MA yang tersedia di tiap kecamatan kurang dari sarana yang dibutuhkan kecuali sarana TK/RA di Kecamatan Sekadau Hilir melebihi kebutuhan,

sedangkan jumlah sarana SD/MI dan SMP/MTs yang tersedia saat ini lebih dari yang dibutuhkan. Berikut proses penskoringan tingkat ketimpangan fisik wilayah berdasarkan variabel sarana pendidikan.

**Tabel 3.** Hasil Skor Sarana Pendidikan (Hasil Analisis, 2020)

Kec.	TK	SD	SMP	SMA	Skor	Keterangan	Kec.	TK	SD	SMP	SMA	Skor	Keterangan
Nanga Mahap	3	1	1	3	3	Ketimpangan Tinggi	Hilir						Sedang
Nanga Taman	3	1	1	3	3		Belintang Hilir	3	1	1	3	3	Ketimpangan Tinggi
Sekadau Hulu	3	1	1	3	3		Belintang	1	1	1	3	2	Ketimpangan Sedang
Sekadau	1	1	1	2	2	Ketimpangan	Belintang Hulu	3	1	1	3	3	Ketimpangan Tinggi

Tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Sekadau berdasarkan ketersediaan sarana kesehatan

adalah ketimpangan sedang. Tingkat ketimpangan dalam penyediaan sarana TK/RA tinggi yang berarti sarana

yang tersedia belum memenuhi standar kebutuhan wilayah. Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya penyediaan sarana TK/RA dikarenakan focus utama pembangunan pada bidang pendidikan di Kabupaten sekadau adalah pembangunan sarana pendidikan dasar (SD dan SMP). Setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau sudah terdapat TK/RA namun karena TK/RA merupakan pendidikan formal non wajib sehingga pembangunannya difokuskan ke beberapa tempat khususnya ibukota kecamatan.

### 3.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan masyarakat. Sehingga dalam peningkatan fisik wilayah, pemerintah perlu memperhatikan penyediaan dan mutu pelayanan sarana kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat ketimpangan wilayah berdasarkan ketersediaan sarana kesehatan dengan membandingkan ketersediaan dengan kebutuhan sarana kesehatan kecamatan. Langkah yang dilakukan adalah membagi jumlah penduduk tiap kecamatan dengan jumlah penduduk pendukung ketersediaan sarana kesehatan. Adapun kriteria kebutuhan sarana kesehatan mengacu

pada SNI-03-1733-2004 dengan mempertimbangkan banyaknya penduduk pendukung bagi pelayanan Puskesmas sebesar 120.00 jiwa, Klinik 2.500 jiwa, Posyandu 1.250 jiwa dan Polindes 30.000 jiwa.

Dengan membandingkan jumlah ketersediaan dan kebutuhan sarana kesehatan, maka didapatkan bahwa ketersediaan puskesmas di tiap kecamatan sudah memenuhi kriteria karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan ada beberapa kecamatan yang melebihi kebutuhan yaitu kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hulu. Ketersediaan klinik di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau memang sudah ada namun tidak memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan kriteria. Walaupun kurangnya ketersediaan klinik di tiap kecamatan di Kabupaten Sekadau, namun pelayanan kesehatan didukung oleh polindes dan posyandu. Semua kecamatan di Kabupaten Sekadau memiliki Posyandu dan memenuhi kebutuhan minimal kecuali Kecamatan Nanga Taman dan Kecamatan Belitang. Ketersediaan Polindes di seluruh kecamatan sudah memenuhi kebutuhan minimal. Berikut tabel perbandingan ketersediaan dan kebutuhan sarana kesehatan serta

**Tabel 3.** Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Kesehatan (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas			Klinik			Posyandu			Polindes		
		Kt (a)	Kb (b)	a / b	Kt (c)	Kb (d)	c / d	Kt (e)	Kb (f)	e / f	Kt (g)	Kb (h)	g / h
Nanga Mahap	27.512	1	1	a = b	0	11	c < d	38	22	e > f	14	1	g > h
Nanga Taman	28.602	1	1	a = b	1	11	c < d	30	23	e > f	17	1	g > h
Sekadau Hulu	30.518	2	1	a > b	0	12	c < d	51	24	e > f	14	1	g > h
Sekadau Hilir	67.892	4	1	a > b	6	27	c < d	60	54	e > f	22	3	g > h
Belitang Hilir	24.175	1	1	a = b	1	10	c < d	25	19	e > f	11	1	g > h
Belitang	14.119	1	1	a = b	1	6	c < d	9	11	e < f	7	1	g > h
Belitang Hulu	21.479	2	1	a > b	1	9	c < d	26	17	e > f	20	1	g > h

*Keterangan:*

*Kb: kebutuhan*

*Kt: Ketersediaan*

Hasil skor ketimpangan dari variabel sarana kesehatan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan fisik wilayah tergolong sedang. 5 dari 7 kecamatan atau sebesar 71% kecamatan di Kabupaten Sekadau tergolong ketimpangan sedang dan 2 dari 7 kecamatan atau 29% kecamatan di Kabupaten sekadau tergolong

ketimpangan tinggi. Kurangnya ketersediaan sarana kesehatan tidak lepas dari kurangnya ketersediaan tenaga medis, terutama dokter. Jumlah dokter di Kabupaten Sekadau menurut data BPS berjumlah 12 orang bahkan terdapat 1 kecamatan yang tidak memiliki dokter.

**Tabel 4.** Hasil Skor Sarana Kesehatan (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Puskesmas	Klinik	Posyandu	Polindes	Skor	Keterangan
Nanga Mahap	2	3	1	1	2	Ketimpangan Sedang
Nanga Taman	2	3	3	1	3	Ketimpangan Tinggi
Sekadau Hulu	1	3	1	1	2	Ketimpangan Sedang
Sekadau Hilir	1	3	1	1	2	Ketimpangan Sedang

Kecamatan	Puskesmas	Klinik	Posyandu	Polindes	Skor	Keterangan
Belitang Hilir	2	3	1	1	2	Ketimpangan Sedang
Belitang	2	3	3	1	3	Ketimpangan Tinggi
Belitang Hulu	1	3	1	1	2	Ketimpangan Sedang

### 3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perekonomian

Sarana perekonomian berpengaruh dalam perkembangan suatu wilayah. Sarana perekonomian merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Sarana perekonomian yang dimaksud untuk melihat ketimpangan wilayah di Kabupaten Sekadau adalah pasar dan toko/kios/warung. Untuk melihatnya, dapat menggunakan SNI-03-1733-2004 dimana sarana ekonomi jenis pasar memiliki kriteria penyediaan

jumlah penduduk pendukung sebesar 120.00 jiwa dan jenis toko/kios/warung sebesar 250 jiwa.

Membandingkan jumlah kebutuhan minimal dengan ketersediaan sarana perekonomian di Kabupaten Sekadau adalah cara untuk melihat ketimpangan wilayah dari ketersediaan sarana perekonomian. Hampir semua ketersediaan sarana perekonomian di Kabupaten Sekadau tidak memenuhi kebutuhan minimal sesuai dengan SNI-03-1733-2004 kecuali ketersediaan pasar di Kecamatan Nanga Taman dan Sekadau Hilir.

**Tabel 5.** Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Perekonomian (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pasar			Toko/Kios/Warung		
		Kt (a)	Kb (b)	a / b	Kt (c)	Kb (d)	c / d
Nanga Mahap	27.512	1	1	a = b	380	110	c > d
Nanga Tman	28.602	1	1	a = b	379	114	c > d
Sekadau Hulu	30.518	0	1	a < b	521	122	c > d
Sekadau Hilir	67.892	3	1	a > b	485	272	c > d
Belitang Hilir	24.175	1	1	a = b	320	97	c > d
Belitang	14.119	1	1	a = b	195	56	c > d

*Keterangan:*

*Kb: Kebutuhan*

*Kt: Ketersediaan*

Penyebab kurangnya ketersediaan pasar di beberapa kecamatan adalah pedagang yang tidak mau berpindah dari kios dagangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, minat masyarakat yang kurang untuk belanja di pasar juga merupakan salah satu faktor penyebab ketidaktersediaan pasar. Setelah

membandingkan jumlah kebutuhan dan ketersediaan sarana perekonomian, didapatkan hasil bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sekadau tergolong ketimpangan sedang. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya ketersediaan sarana perekonomian di Kabupaten Sekadau berdasarkan SNI-03-1733-2004.

**Tabel 6.** Hasil Skor Sarana Perekonomian (Hasil Analisis, 2020)

Kec	Pasar	Toko/Kios/Warung	Rata-Rata	Keterangan
Nanga Mahap	2	1	2	Ketimpangan Sedang
Nanga Taman	2	1	2	
Sekadau Hulu	3	1	2	

Setelah melakukan skoring untuk ketiga variabel penilaian ketimpangan fisik wilayah pada 7 kecamatan, dilanjutkan dengan merkapitulasi hasil skor untuk mendapatkan gambaran rata-rata tingkat ketimpangan

Kec	Pasar	Toko/Kios/Warung	Rata-Rata	Keterangan
Sekadau Hilir	1	1	1	
Belitang Hilir	2	1	2	
Belitang	2	1	2	
Belitang Hulu	3	3	3	

fisik wilayah Kabupaten Sekadau. Hal ini dapat diklasifikasikan dengan menggunakan rumus interval 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, rendah. Nilai maksimum dan nilai minimum diperoleh dari dari total skor tertinggi

dan terendah setiap variabel penilaian ketimpangan fisik, yakni ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana perekonomian. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Range}}{k}$$

Keterangan:

I = Interval

Range = Nilai maksimum – Nilai minimum

K = Kelas

$$I = \frac{9 - 3}{3} = 2$$

Sehingga klasifikasi yang akan digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah di Kabupaten Sekadau dari kondisi fisik adalah.

< 6 : Ketimpangan Rendah

6 – 7 : Ketimpangan Sedang

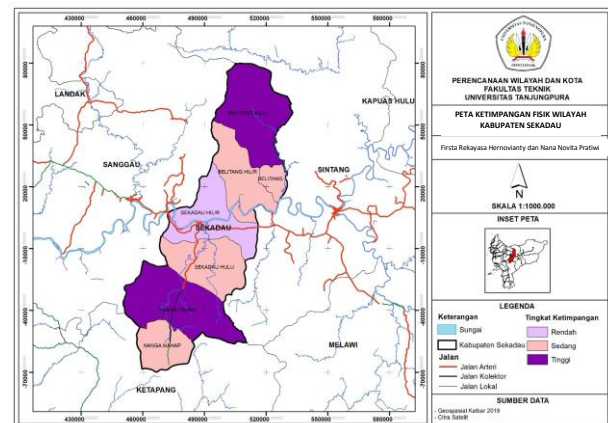
> 7 : Ketimpangan Tinggi

**Tabel 7.** Tingkat Ketimpangan Fisik Wilayah Kabupaten Sekadau (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Sarana			Total	Tingkat Ketimpangan
	Pendidikan	Kesehatan	Perekonomian		
Nanga Mahap	3	2	2	7	Ketimpangan Sedang
Nanga Taman	3	3	2	8	Ketimpangan Tinggi
Sekadau Hulu	3	2	2	7	Ketimpangan Sedang
Sekadau Hilir	2	2	1	5	Ketimpangan Rendah
Belitang Hilir	3	2	2	7	Ketimpangan Sedang
Belitang	2	3	2	7	Ketimpangan Sedang
Belitang Hulu	3	2	3	8	Ketimpangan Tinggi

Berdasarkan hasil analisis, ketimpangan fisik wilayah Kabupaten Sekadau masih tergolong ketimpangan sedang, dimana 57% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan sedang, 29% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan tinggi dan 14% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang. Ketersediaan sarana kesehatan dan sarana perekonomian di Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu dan Belitang Hilir sama dengan jumlah kebutuhan menurut standar maka tingkat ketimpangan fisik tergolong sedang. Kecamatan Belitang juga memiliki tingkat ketimpangan sedang karena dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan sarana pendidikan dan sarana perekonomian yang sama dengan jumlah kebutuhan. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik tinggi adalah Kecamatan Nanga Taman dan Belitang Hulu. Jumlah sarana kesehatan dan sarana pendidikan di Kecamatan Nanga Taman yang masih dibawah standar pelayanan menyebabkan ketimpangan fisik tergolong tinggi. Kecamatan Belitang Hulu juga memiliki tingkat ketimpangan fisik tinggi karena dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan sarana

pendidikan dan sarana perekonomian yang masih kurang dari jumlah kebutuhan. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik rendah adalah Kecamatan Sekadau Hilir karena ketersediaan sarana ekonomi di kecamatan ini sudah melebihi dari jumlah kebutuhan.



**Gambar 1.** Peta Ketimpangan Fisik Wilayah Kabupaten Sekadau (Hasil Analisis, 2020)

**Tabel 8.** Ketimpangan Fisik Menurut Jenis Sarana di Kabupaten Sekadau (Hasil Analisis, 2020)

Kecamatan	Tingkat Ketimpangan Menurut Jenis Sarana		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nanga Mahap		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana Kesehatan</li> <li>Sarana Perekonomian</li> </ul>	Sarana Pendidikan

Kecamatan	Tingkat Ketimpangan Menurut Jenis Sarana		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nanga Taman		Sarana Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pendidikan</li> <li>• Sarana Kesehatan</li> </ul>
Sekadau Hulu		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Kesehatan</li> <li>• Sarana Perekonomian</li> </ul>	Sarana Pendidikan
Sekadau Hilir	Sarana Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pendidikan</li> <li>• Sarana Kesehatan</li> </ul>	
Belitang Hilir		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Kesehatan</li> <li>• Sarana Perekonomian</li> </ul>	Sarana Pendidikan
Belitang		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pendidikan</li> <li>• Sarana Perekonomian</li> </ul>	Sarana Kesehatan
Belitang Hulu		Sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pendidikan</li> <li>• Sarana Perekonomian</li> </ul>

Jika dilihat dari jenis sarana, kelengkapan sarana pendidikan merupakan faktor fisik yang mempengaruhi ketimpangan sedang di Kecamatan Sekadau Hilir dan Kecamatan Belitang. Kelengkapan sarana kesehatan menyebabkan ketimpangan sedang terjadi di Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, Belitang Hilir dan Belitang Hulu. Kelengkapan sarana

#### 4. Kesimpulan

Tingkat ketimpangan fisik wilayah di Kabupaten Sekadau adalah ketimpangan sedang, dimana 57% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan sedang, 29% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan tinggi dan 14% kecamatan berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik tinggi adalah Kecamatan Nanga Taman dan Belitang Hulu. Kecamatan yang tergolong ketimpangan fisik rendah adalah Kecamatan Sekadau Hilir.

Kelengkapan sarana pendidikan mempengaruhi ketimpangan sedang di Kecamatan Sekadau Hilir dan Belitang. Kelengkapan sarana kesehatan mempengaruhi ketimpangan sedang di Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, Belitang Hilir dan Belitang Hulu. Kelengkapan sarana perekonomian mempengaruhi ketimpangan sedang di Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir. Perlunya peningkatan dalam penyediaan sarana baik sarana pendidikan, kesehatan maupun perekonomian di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau. Selain itu, pemerataan penduduk, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan juga diperlukan agar pelayanan umum daerah terpenuhi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

perekonomian mempengaruhi ketimpangan sedang terjadi di Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang. Terbatasnya anggaran, kurang meratanya sebaran penduduk dan rendahnya aksesibilitas menyebabkan penyediaan sarana fisik setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau kurang maksimal.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Teknik UNTAN yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambardi, U. M., & Prihawantoro, S. (2002). *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Aprianoor, P., & Mukhtali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 484-498. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9809>
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Sekadau. ISSN: 2088-964X
- Nasional, B. S. (2004). SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan. Jakarta: BSN.
- Rosmeli, R. (2018). Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(1), 79-84.
- Simbolon, T. R. (2017). Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah

Sumatera. Dalam *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017*, Center for Open Science. DOI: 10.31219/osf.io/xzmr9.

<<https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/xzmr9.html>>

Sirojuzilam. (2005). Regional Planning and Development. Wahana Hijau. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol.1 No. 1 Agustus 2005.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Zahnd, M. (2008). *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius.